

EFEKTIVITAS SOSIALISASI DALAM PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK 2024 DI KABUPATEN SIDOARJO

¹Lutfiatul Laili Arrohmah, ²Julia Putri Anggraini, ³Salsa Nanda Afika, ⁴Arini darajah, ⁵Syam
Rahmanto

^{1,2,3,4}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, ⁵KPU Kabupaten Sidoarjo

Correspondent author: singgih.m.adneg@upnjatim.ac.id

^{1,2,3,4}Kota Surabaya, ⁵Kabupaten Sidoarjo, Indonesia

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of socialization in the implementation of the 2024 elections in Sidoarjo Regency by using Gibson et al.'s (2003) theory of effectiveness as its analytical tool. This study uses a case study type of research with a qualitative approach. In this study, secondary data sources were used, namely data collected through interviews and observations of the community who participated in socialization activities and primary data obtained from reading materials. The results of the study show that the socialization carried out by the Sidoarjo Regency KPU has succeeded in increasing public participation in the election, as reflected in the increase in the number of permanent voters by 4.58% from 2019. The adaptation of socialization methods through social media and digital content since the COVID-19 pandemic has also proven effective in reaching various levels of society, including remote areas and special communities. Overall, this study confirms that the socialization strategy implemented by the Sidoarjo Regency KPU is effective in supporting the implementation of the 2024 simultaneous elections, and contributes to increasing political participation and public awareness of the importance of elections in Indonesian democracy.

Keywords: Effectiveness; Elections; Socialization

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sosialisasi pada pelaksanaan pemilu 2024 di Kabupaten Sidoarjo dengan penggunaan teori efektivitas Gibson dkk (2003) sebagai pisau analisisnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *case studies* dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu data dikumpulkan dengan cara wawancara serta observasi kepada masyarakat yang mengikuti kegiatan sosialisasi serta data primer yang diperoleh dari bahan bacaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Sidoarjo telah berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, tercermin dari peningkatan jumlah pemilih tetap sebanyak 4,58% dari tahun 2019. Adaptasi metode sosialisasi melalui media sosial dan konten digital semenjak pandemi COVID-19 juga terbukti efektif dalam menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk daerah terpencil dan komunitas khusus. Secara keseluruhan, penelitian ini mengonfirmasi bahwa strategi sosialisasi yang diterapkan oleh KPU Kabupaten Sidoarjo efektif dalam mendukung pelaksanaan pemilu serentak 2024, serta berkontribusi pada peningkatan partisipasi politik dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilu dalam demokrasi Indonesia.

Kata Kunci: Efektivitas, Sosialisasi, Pemilu

PENDAHULUAN

Pada negara demokrasi tentu saja seluruh kegiatan negara dijalankan oleh dan untuk rakyat. Demokrasi sendiri diartikan sebagai sistem pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat, dimana setiap orang dapat mengambil bagian perihal keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya dalam bernegara. Rakyat yang berperan sebagai penggerak pemerintahan tentu saja harus dilibatkan dalam segala hal yang dilakukan oleh pemerintah sebagai wakil rakyat. Pemerintah memiliki setidaknya empat fungsi dalam penyelenggaraan negara, yaitu fungsi pelayanan (*service*), fungsi pengaturan (*regulating*), fungsi pembangunan (*development*), dan fungsi pemberdayaan (*empowerment*). Untuk mengemban keempat fungsi berat ini tentu saja rakyat perlu mengetahui siapa dan bagaimana seorang wakil rakyat akan menjalankan tugas tersebut. Transparansi adalah salah satu prinsip utama dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemerintahan yang dijalankan oleh wakil rakyat. Transparansi pada proses pemerintahan dihadirkan guna menghasilkan keyakinan antara masyarakat kepada pemerintah sebagai wakil rakyat melalui kemudahan aksesibilitas informasi yang akurat dan memadai dari dalam maupun luar negeri (Dewi, 2022).

Guna mendapatkan keyakinan rakyat terhadap wakilnya yaitu pemerintah, tentu saja rakyat perlu mengetahui siapa yang akan menjadi pemegang kekuasaan kelak. Disini proses Pemilu dibutuhkan sebagai wadah pengenalan rakyat kepada calon wakilnya kelak. Dalam konteks pemilihan umum, partisipasi masyarakat menjadi landasan penting agar pemilu dapat berjalan dengan lancar. Pemilu sendiri merupakan tahapan yang sangat penting dalam sistem demokrasi Indonesia. Dalam pemilu, warga negara mempunyai hak untuk memilih wakilnya untuk memimpin pemerintahan. Dalam prosesi pemilu pula, kualitasnya bergantung pada partisipasi masyarakatnya, seberapabanyak masyarakat yang turut hadir dalam prosesi pemilihan (Muhaling 2013) dalam (Maulida & Wijayanto, 2023). Dalam Studi Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai pemerintah dengan demokratisasi adalah mencapai demokrasi yang matang pada tahun 2029. Untuk mewujudkan hal tersebut ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, tahap ini mencakup tahap inisiasi hingga konsolidasi demokrasi. Fase inisiasi atau pembentukan dimulai dengan pemilihan pada tahun 1999, sebagai pemilihan umum pertama pasca reformasi. Penyelenggaraan pemilihan presiden secara langsung yang dilaksanakan pertama kali pada tahun 2004 mengubah dinamika kekuasaan politik. Pemilihan parlemen dan presiden tahun 2009 memberikan legitimasi baru bagi pemerintahan demokratis juga menciptakan pondasi bagi pelaksanaan demokrasi. (mpr.go.id). Esensi pemilu diperkuat pada tahap instalasi pada tahun 2004, ketika pemilihan presiden langsung diadakan untuk pertama kalinya. Adanya kemajuan yang tercermin dari peningkatan jumlah partai peserta, keberagaman ideologi yang diusung, peningkatan

partisipasi politik masyarakat, aktivitas pembuatan peraturan pemilu di legislatif, dan munculnya mekanisme pengkubuan politik untuk kandidat calon presiden, munculnya lembaga penelitian dan penelitian pemilu, dan tersebar luas (Fawaid & Anugerah, 2023). Masyarakat sipil sebagai mekanisme kompensasi terhadap pemerintah. Pemilu dilaksanakan secara berturut-turut setiap lima tahun sekali.

Pemilu tahun 2024 menjadi momen penting yang diharapkan mampu dan digadang-gadang dapat menjadi penggerak dalam peralihan demokrasi Indonesia menuju demokrasi yang matang di seluruh tingkat struktur politik nasional. Pemilu ini dilaksanakan secara serentak antara pemilu legislatif, eksekutif, dan pilkada. Kesenjangan dalam pemilihan umum sebagaimana yang diamanatkan dalam Konstitusi tetap dapat terjaga. Selain itu, keserentakan pemilu DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, tertanggal 23 Januari 2014 serta Pasal 167 ayat (3), Pasal 167 ayat (4) huruf f, dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 (Silalahi, 2022). Pemilu dapat terlaksana dengan baik karena didukung oleh faktor teknologi yang semakin berkembang. Melalui teknologi berbasis SIREKAP yang memudahkan proses perhitungan suara di daerah-daerah yang belum mampu menerapkan sistem pemungutan suara elektronik dengan baik (Dio Laarino dan Wylly Yustanti, 2016) dalam (Hardiyanti et al., 2022) (Hardiyanti et al., 2022). Selain perkembangan teknologi, partisipasi masyarakat juga menjadi faktor keberhasilan pemilu 2024. Partisipasi publik menjadi penting untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan dalam pemerintahan (Sinaga, n.d.). Pendekatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu adalah melalui pendekatan terpadu yang memperhatikan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan perekonomian, termasuk pemahaman mengenai pemekaran wilayah Indonesia (Sinaga, n.d.).

Kehadiran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pelaksana pemilu dituntut untuk dapat melaksanakan kegiatan pemilihan umum secara profesional, akuntabel, dan berintegritas tinggi sebab ini merupakan hal mendasar. KPU bertugas merencanakan instrumen hukum untuk menjamin masyarakat untuk dapat menentukan hak memilihnya. Sebagaimana tertuang dalam salah satu fokus misi KPU, yaitu: "Meningkatkan kesadaran politik masyarakat agar efektif mengikuti pemilu demi terwujudnya standar masyarakat Indonesia yang berdasarkan hukum" (Masleka Pratama Putri, n.d.). KPU menyebutkan bahwa sosialisasi pemilih bagi pemilih pemula bertujuan membangun kesadaran dan pemikiran kritis para pemilih muda untuk memilih dan berpartisipasi menyelenggarakan pemilu yang bersih dan anti politik uang lewat pendidikan politik, memberi informasi terkait prosedur memilih (bagaimana cara memilih, bagaimana memastikan diri terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), bagaimana cara mengecek rekam jejak caleg, dan lain sebagainya),

membuka wawasan pemilih pemula tentang berbagai isu kepegiluan seperti *E-government*, peranan sosial media dalam politik dan pemilu, pemilu, politik masuk kampus, dan daftar pemilih tetap. Sosialisasi dengan mendorong generasi muda agar kampanye sosialisasi secara masif di media sosial yang kerap digunakan generasi muda dan tidak lupa mengadakan event pemilu yang seru dan interaktif untuk menarik minat pemuda. Tidak hanya itu juga merekrut influencer, selebgram, artis muda sebagai duta sosialisasi pemilu. Informasi dari sosialisasi juga disampaikan di tempat yang sering dikunjungi oleh masyarakat. Sosialisasi ini juga menghindari adanya simpang siur.

KPU Kabupaten Sidoarjo memiliki tanggung jawab besar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Untuk menjalankan tugas sosialisasi tersebut struktural KPU ada pada semua tingkatan wilayah, hal tersebut dikarenakan adanya pembentukan kepanjangan dari KPU sendiri. Salah satu Komisi Pemilihan Umum di Daerah yang mempunyai tugas dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat telah dijelaskan pada undang-undang Nomor 7 tentang Pemilihan Umum Tahun 2017 Pasal 18 J yakni "menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten/kota kepada masyarakat. Menurut Abdulsyani (2007) dalam Febrianto Pangky (2022) sosialisasi adalah proses belajar yang dilakukan oleh seseorang untuk berbuat dan bertingkah laku berdasarkan patokan yang terdapat dan diakui dalam masyarakat. Dalam politik terdapat istilah sosialisasi politik. Sosialisasi politik merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Sosialisasi merupakan media masyarakat dalam memperoleh informasi (Damsar,2013) dalam (Paula et al., 2024). KPU Kabupaten Sidoarjo menggunakan berbagai metode sosialisasi untuk menyebarkan informasi dan memberikan pemahaman tentang pemilu kepada masyarakat. Dilansir dari akun Instagram resmi KPU Kabupaten Sidoarjo pada masa pemilu 2019 lalu, KPU Kabupaten Sidoarjo juga sudah melakukan kegiatan sosialisasi Pendidikan pemilih sebanyak lebih dari 20 pertemuan, dan tentu saja dibarengi dengan acara-acara interaktif lain seperti Pemilu Run serta konser musik untuk menggaet masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan sosialisasi. Yang kemudian pada masa Pemilu 2024 ini, KPU Kabupaten Sidoarjo mengadakan kembali kegiatan sosialisasi Pendidikan Pemilih bersamaan dengan Kirab Pemilu 2024 setelah sebelumnya dilakukan di KPU Kota Makassar. Kirab Pemilu sendiri merupakan wadah sosialisasi serta penyaluran informasi mengenai kegiatan pemilu kepada masyarakat termasuk didalamnya sosialisasi pendidikan pemilih (KPU, n.d.). Kegiatan ini telah dilakukan sebanyak lebih dari 20 pertemuan dengan mengusung berbagai tema seperti *KPU Goes to School*, *KPU Goes to Campus*, dan *Sosdiklih* (Sosialisasi Pendidikan Pemilih). Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media komunikasi seperti spanduk, media online, media cetak, dan forum diskusi terbuka di masyarakat. KPU secara teratur menyelenggarakan pertemuan

terbuka secara umum yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan, termasuk media massa, LSM, dan masyarakat sipil. Melalui pertemuan ini, KPU memberikan informasi terkini mengenai persiapan dan pelaksanaan pemilihan, tata cara memilih serta memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengajukan pertanyaan. Selain itu, KPU juga menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan informasi melalui akun media sosial seperti instagram.

Seiring dengan berkembangnya zaman serta pertumbuhan penduduk, berbagai upaya telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Sidoarjo untuk dapat meningkatkan kesadaran politik masyarakatnya dalam menggunakan hak memilih, strategi sosialisasi yang dilakukan diharapkan dapat benar-benar meningkatkan partisipasi masyarakat serta menekan angka Golput. Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas sosialisasi dalam pelaksanaan pemilu serentak 2024 di Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan tolak ukur teori efektivitas dari Gibson dkk (2003) yang terdiri dari produksi, efektivitas, kepuasan, adaptasi, dan pengembangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian case studies dengan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell (2008) dalam Semiawan (2010) penelitian kualitatif dijabarkan sebagai suatu pendekatan atau pencarian guna mendalami serta terjun lebih dalam pada suatu fenomena inti. Pada penelitian pendekatan kualitatif hasil penelitian adalah berupa penjabaran (narasi) yang didapat melalui proses pengumpulan data kualitatif (Ismail Suardi Wekke, dkk, n.d.). Menurut Danin (2002) dalam Mappasere & Suyuti (2019) penelitian kualitatif membenarkan bahwa kebenaran itu dinamis serta didapat dari pengkajian terhadap orang-orang melalui kontribusinya dengan situasi sosial mereka. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu data dikumpulkan dengan cara wawancara serta observasi kepada masyarakat yang mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sidoarjo serta petugas KPU Kabupaten Sidoarjo selaku penggerak kegiatan sosialisasi serta Kirab Pemilu tahun 2024. Yang kemudian dari data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teori efektivitas menurut Gibson dkk (2003) yang mana terdapat 5 indikator yaitu produksi, efektivitas, kepuasan, adaptasi, dan pengembangan. Setelah itu dari data yang diperoleh akan dianalisis serta diinterpretasikan ke dalam bentuk laporan tertulis (Semiawan, n.d.).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk melihat bagaimana efektivitas dari program sosialisasi pada pelaksanaan pemilu serentak 2024 di Kabupaten Sidoarjo, penulis menggunakan teori efektivitas yang disajikan

oleh Gibson dkk sebagai pisau analisisnya. Gibson dkk sendiri menyebutkan bahwa terdapat lima kategori keberhasilan yaitu: 1) produksi; 2) efisiensi; 3) kepuasan; 4) adaptasi; 5) dan pengembangan. Analisis yang dilakukan bertujuan untuk menjabarkan sejauh mana keberhasilan serta dampak positif yang ditimbulkan dari pelaksanaan program sosialisasi untuk mendukung keberhasilan pada pelaksanaan pemilu serentak 2024 di Kabupaten Sidoarjo.

1. Produksi

Menurut Gibson dkk (2002) dalam Korengkeng et al., (2023) produksi didefinisikan sebagai kapasitas organisasi untuk memenuhi persyaratan lingkungan untuk kualitas dan kuantitas keluaran. Dari hasil wawancara penulis didapatkan informasi bahwa ada beberapa bentuk sosialisasi yang dilakukan KPU Sidoarjo yaitu, kirab pemilu, nonton bareng (nobar), dan sosialisasi secara umum di lembaga pendidikan, daerah terpencil seperti Dusun Kepetingan di Kecamatan Buduran dan Dusun Pucukan di Kecamatan Sidoarjo, dan beberapa komunitas. Dua bentuk sosialisasi yang dilaksanakan di setiap daerah berdasarkan perintah dari KPU RI yaitu kirab pemilu dan nonton bareng (nobar) film "Kejarlah Janji". Kirab pemilu dilaksanakan secara nasional dengan tujuan untuk memperkenalkan hari dan tanggal pemilihan umum serta peserta pemilu kepada masyarakat. Kirab pemilu di Sidoarjo dimulai pada 27 Agustus 2023. Rombongan kirab pemilu disambut oleh seluruh pihak dan meneruskan kirab di wilayah Sidoarjo. kirab pemilu berlangsung selama 7 hari berturut-turut. Kegiatan kirab meliputi tiga rangkaian acara, yaitu pawai kirab, seremonial di pendopo, dan urutan pemberangkatan kirab. Kemudian pada 3 September 2023, bendera-bendera partai politik tersebut di kirab ke Kabupaten Mojokerto. Selain kirab, agenda KPU RI yang dilaksanakan di setiap daerah adalah nonton bareng film "Kejarlah Janji" sekaligus memperingati Hari Santri pada tanggal 22 Oktober di Pondok Pesantren Man'baul Hikam dan pada tanggal 28 Oktober di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Selain agenda KPU RI, KPU Kabupaten Sidoarjo juga memiliki agenda sosialisasi sendiri yang dilaksanakan di daerah terpencil tepatnya di daerah kepetingan, lembaga pendidikan, pasar dan komunitas seperti komunitas disabilitas, emak-emak, dan anak jalanan. Sosialisasi yang dilakukan tim KPU Kabupaten Sidoarjo bertujuan memberi pandangan kepada masyarakat terkait informasi calon.

Dalam pelaksanaan sosialisasi, KPU Kabupaten Sidoarjo bekerjasama dengan beberapa *stakeholder* yaitu LSM, lembaga pendidikan, kelompok keagamaan, purnawirawan. *Stakeholder* membantu KPU Kabupaten Sidoarjo dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Metode sosialisasi yang digunakan berbagai macam baik secara formal seperti diskusi yang dilakukan pada murid-murid di sekolah dan kampus atau secara informal seperti menggunakan media musik serta sosialisasi melalui sosial media. Metode sosialisasi yang dilakukan menyesuaikan target yang akan disosialisasi. Perbedaan

metode yang dilakukan dalam sosialisasi disesuaikan dari tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi target sosialisasi. Misalnya pada murid dan mahasiswa metode yang dilakukan berupa pemaparan dan juga diskusi. Sedangkan pada komunitas anak jalanan dilakukan melalui media musik dengan cara mengajak mereka untuk tampil menunjukkan bakat mereka. Setelah itu tim sosialisasi dari KPU baru dapat menyampaikan informasi terkait pemilu. Setiap sosialisasi dihadiri oleh peserta sosialisasi sesuai target yang dituju. Misalnya sosialisasi yang dilakukan di sekolah dihadiri oleh murid sekolah, kemudian sosialisasi yang dilakukan di daerah terpencil yaitu daerah kepetingan dihadiri oleh warga daerah tersebut. Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sidoarjo diharapkan mampu meningkatkan partisipasi warga dalam pemilu serentak 2024.

Berdasarkan data sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sidoarjo, kegiatan sosialisasi dilakukan dengan sasaran peserta masyarakat umum, komunitas masyarakat serta berkolaborasi dengan lembaga pendidikan seperti sekolah dan juga perguruan tinggi. Adapun berikut data sosialisasi yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Sidoarjo di tahun 2023 sampai 2024:

Tabel 1. Data Sosialisasi Umum KPU Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023-2024

No.	Kegiatan	Target Peserta	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi	Sasaran Peserta
1.	Sosialisasi PKPU Nomor 25 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara	50	13-jan-24	Hall KPU Kabupaten Sidoarjo	Umum
2.	Pendidikan Pemilih dalam rangka Peningkatan Partisipasi Masyarakat pada Pemilu 2024	100	22-Des-23	Grand Whiz Hotel Trawas Mojokerto	Komunitas
3.	Media Gathering "Peran media dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat pada Pemilu 2024"	100	13-Des-23	Grand Whiz Hotel Trawas Mojokerto	Komunitas
4.	Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024	75	12-Des-23	Dusun Pucukan, Kelurahan Gebang, Kecamatan Sidoarjo	Umum
5.	Sosialisasi Pendidikan Pemilihan Umum Tahun 2024	75	12-Des-23	Dusun Kepetingan, Desa Sawohan, Kecamatan	Umum

No.	Kegiatan	Target Peserta	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi	Sasaran Peserta
Buduran					
6.	Sosialisasi Keputusan KPU No. 927 Tentang Penetapan Lokasi APK	70	25-Nov-23	Aula KODIM 0816 Sidoarjo	Umum
7.	Kunjungan Kepemiluan	30	30-Ags-23	Kantor KPU Kabupaten Sidoarjo	Pemilih pemula
8.	Suara Demokrasi	60	8-Ags-23	Kantor KPU Kabupaten Sidoarjo	Pemilih pemula
9.	Pendidikan Demokrasi Pancasila Bersama KPU Sidoarjo	150	11-Ags-23	Auditorium MAN Sidoarjo	Pemilih pemula

Sumber: Data KPU Kabupaten Sidoarjo

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa KPU Kabupaten Sidoarjo telah melakukan 9 kali sosialisasi ke masyarakat umum, komunitas, dan pemilih pemula. Sosialisasi yang dilakukan sebanyak 4 kali dengan sasaran peserta secara umum dan dilakukan sebanyak 2 kali dengan sasaran peserta komunitas serta dilakukan sebanyak 3 kali dengan sasaran peserta pemilih pemula. Tujuan dilakukannya sosialisasi ini agar masyarakat mengetahui kandidat pasangan calon presiden wakilnya juga memberi pandangan kepada masyarakat sehingga dapat berpartisipasi dalam menentukan pilihannya serta mengetahui jadwal pelaksanaan pemilu. KPU Sidoarjo juga melakukan sosialisasi di lembaga pendidikan melalui program *KPU Goes to school* dan *KPU Goes to Campus*.

Tabel 2. Data Sosialisasi *KPU Goes to School* dan *KPU Goes to Campus*

No.	Kegiatan	Target Peserta	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi	Sasaran Peserta
1.	<i>KPU Goes to School</i>	250	28-Nov-23	SMK Antartika 2 Sidoarjo	Pemilih pemula
2.	<i>KPU Goes to School</i>	150	30-Okt-23	SMPN 3 Krian	Pemilih pemula
3.	<i>KPU Goes to School</i>	300	9-Nov-23	SMAN 1 Porong	Pemilih pemula
4.	<i>KPU Goes to School</i>	250	30-Okt-23	SMAN 1 Taman	Pemilih pemula
5.	<i>KPU Goes to School</i>	300	13-Okt-23	SMA Katolik Untung Suropati Sidoarjo	Pemilih pemula
6.	<i>KPU Goes to School</i>	300	13-Okt-23	SMPN 3 Sidoarjo	Pemilih pemula
7.	<i>KPU Goes to School</i>	300	23-Sep-23	SMPN 1 Sidoarjo	Pemilih pemula

No.	Kegiatan	Target Peserta	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi	Sasaran Peserta
8.	KPU Goes to School	400	21-Sep-23	SMP Budi Utomo Prambon	Pemilih pemula
9.	KPU Goes to School	300	11-Sep-23	SMPN 2 Gedangan	Pemilih pemula
10.	KPU Goes to School	300	8-Sep-23	SMAN 1 Waru	Pemilih pemula
11.	KPU Goes to School	300	6-Sep-23	SMPN 1 Porong	Pemilih pemula
12.	KPU Goes to School	300	5-Sep-23	SMP Bilingual Terpadu Al Amanah Juwangi Krian	Pemilih pemula
13.	KPU Goes to School	150	31-Ags-23	SMPN 1 Jabon	Pemilih pemula
14.	KPU Goes to School	298	0-Ags-23	SMKN 1 Buduran	Pemilih pemula
15.	KPU Goes to Campus nonton bareng film "Kejarlah Janji"	250	28-Okt-23	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	Pemilih pemula
16.	KPU Goes to Campus nonton bareng film "Kejarlah Janji"	250	22-Okt-23	Pondok Pesantren Man'baul Hikam Tanggulangin, Sidoarjo	Pemilih pemula
17.	KPU Goes to School	300	20-Sep-23	SMP AL Islam Krian	Pemilih pemula
18.	KPU Goes to School	300	18-Sep-23	SMPN 2 Buduran	Pemilih pemula
19.	KPU Goes to School	400	12-sep-23	SMPN 3 Waru	Pemilih pemula
20.	KPU Goes to School	500	22-Ags-23	SMA Kemala Bhayangkari Porong	Pemilih pemula

Sumber: Data KPU Kabupaten Sidoarjo

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa KPU Kabupaten Sidoarjo telah melakukan 20 kali sosialisasi ke beberapa lembaga pendidikan. Terlebih lagi pada tingkat SMP, setidaknya telah dilakukan sosialisasi sebanyak 12 kali sosialisasi, sedangkan di tingkat SMA/SMK dilakukan sosialisasi sebanyak 6 kali, serta pada jenjang perguruan tinggi dan pesantren KPU Kabupaten Sidoarjo telah melakukan sosialisasi sebanyak 1 kali. KPU Kabupaten Sidoarjo lebih dominan untuk melakukan sosialisasi pada jenjang SMP karena untuk mengenalkan konsep demokrasi dan proses pemilu sejak dini, membantu membentuk pemahaman dan kesadaran politik pada generasi muda, dan juga untuk pembentukan karakter. Usia SMP merupakan periode kritis dalam pembentukan karakter, melalui sosialisasi pemilu siswa dapat belajar tentang pentingnya berpartisipasi, tanggung jawab, dan berintegritas tinggi

dalam kehidupan bernegara. KPU Kabupaten Sidoarjo melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula yang berada pada tingkat SMP, SMA/SMK, PTS, dan Pesantren bertujuan untuk menambah wawasan bagi para pemilih pemula agar memahami bagaimana prosedur dan proses dalam pemilihan umum. Adanya upaya sosialisasi kepada masyarakat khususnya tingkat pelajar atau mahasiswa tersebut tingkat partisipasi pemilih pemula di kabupaten Sidoarjo menjadi meningkat, karena para calon pemilih sudah mendapatkan informasi tentang pemilihan umum dengan sangat detail dan signifikan jadi bisa dengan mudah para pemilih untuk mempraktekkan pada pemilu yang telah ditentukan.

2. Efisiensi

Menurut Gibson dkk (2002) dalam Korengkeng et al., (2023) efisiensi. didefinisikan sebagai bilangan perbandingan atau perbandingan antara masukan dan keluaran. Parameter efisiensi ini harus dinyatakan dengan menggunakan perbandingan antara biaya dan keuntungan atau antara output dan waktu. Diketahui bahwa kegiatan sosialisasi berdampak signifikan terhadap efisiensi program. Kegiatan sosialisasi tidak hanya sebagai media penyebaran informasi tetapi juga menjadi ajang silaturahmi antara KPU Kabupaten Sidoarjo dengan masyarakat. Diadakannya sosialisasi pemilu menciptakan aksesibilitas informasi yang lebih baik bagi masyarakat. Dengan langsung berkomunikasi bersama masyarakat di tempat-tempat ramai kegiatan seperti pasar, berkolaborasi dengan instansi pendidikan dengan konsep "KPU Goes to School" , serta instansi perguruan tinggi dengan konsep "KPU Goes to Campus", tim sosialisasi dapat menyampaikan informasi secara langsung mengenai nama-nama paslon pada surat suara, tata cara pemilu, pengenalan surat suara, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan agar seluruh masyarakat Sidoarjo dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 dengan benar dan sesuai aturan yang berlaku serta mendapatkan informasi-informasi tambahan lainnya. Kegiatan sosialisasi secara langsung yang dilakukan dua arah ini juga membantu tim sosialisasi KPU untuk langsung memverifikasi informasi dan merespons perubahan yang mungkin terjadi dengan cepat.

Sosialisasi yang dilakukan secara *face to face* mendorong komunikasi aktif masyarakat dengan pegawai pemerintahan, masyarakat menjadi merasa lebih dilibatkan dalam hal pemerintahan serta mendapat pemahaman lebih terkait prosesi pemilu 2024. Selain kepada masyarakat umum, KPU Kabupaten Sidoarjo juga menargetkan komunitas-komunitas tertentu sebagai target sosialisasi. Seperti komunitas penyandang disabilitas, komunitas Waria, serta anak jalanan yang tentu saja dalam penyampaian sosialisasi KPU memiliki caranya tersendiri untuk tiap-tiap target sosialisasi.

3. Kepuasan

Konsep kepuasan mengandung arti bahwa pengamatan terhadap keuntungan yang diperoleh peserta atau kliennya mengacu pada seberapa baik organisasi memenuhi

kebutuhan anggota atau stafnya. Dalam penelitian ini, dimensi kepuasan menunjuk kepada tanggapan masyarakat terhadap kegiatan sosialisasi yang dilakukan. Sosialisasi yang dilakukan tim KPU Kabupaten Sidoarjo mendapat respon positif dari masyarakat. Masyarakat antusias ketika menerima informasi terkait pemilu. Selain tanggapan masyarakat, *output* yang dihasilkan dari adanya sosialisasi adalah adanya peningkatan partisipasi masyarakat yang datang ke TPS. Pada pemilu tahun 2019 jumlah data pemilih adalah sebanyak 1.397.570 peserta sedangkan pada tahun 2024 sejumlah 1.461.642, ada kenaikan jumlah data pemilih sebanyak 64.072 peserta pemilih tetap atau sebesar 4,58% (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo, n.d.). Menurut Bapak Sam selaku Teknisi Penyelenggaraan dan Hubungan Partisipasi Sosialisasi yang dilakukan pasti efektif karena masyarakat tidak akan tahu akan ada kegiatan pemilu apabila tidak ada sosialisasi. Selain itu, keberhasilan dari kegiatan sosialisasi juga berdampak pada pengembangan *skills* tim sosialisasi dalam melakukan komunikasi interpersonal serta peningkatan pemahaman kebutuhan serta harapan masyarakat.

4. Adaptasi

Dari hasil penelitian yang diperoleh, adaptasi yang dilakukan oleh pihak KPU Kabupaten Sidoarjo terlihat dari bagaimana menciptakan perubahan yang cukup signifikan seperti penyesuaian gaya penyampaian pada saat kegiatan sosialisasi. Konsep adaptasi mengandung pengertian bahwa sebagai kapasitas, organisasi atau perusahaan bereaksi terhadap perubahan internal dan eksternal (Reynaldi Alex Korengkeng et al., n.d.) . Dalam penelitian ini, dimensi adaptasi menunjuk kepada tindakan apa yang dilakukan untuk menghadapi perubahan yang terjadi. Teknisi hubungan dan partisipasi masyarakat mengatakan bahwa KPU memiliki cara alternatif lain dalam menyampaikan informasi selain dilakukan melalui sosialisasi yaitu dengan menggunakan media sosial *instagram* yang diisi konten serta lebih melengkapi isi pada *website* resmi KPU Kabupaten Sidoarjo. Cara ini dilakukan KPU agar informasi yang diberikan sampai ke semua kalangan masyarakat karena masyarakat dapat mengakses informasi dimanapun mereka berada dan kapanpun. Adapun adaptasi yang dilakukan dalam menghadapi kendala ketika melakukan sosialisasi pada daerah terpencil adalah menyewa perahu untuk dapat menjangkau daerah tersebut. Hal ini dilakukan agar semua lapisan masyarakat di daerah Sidoarjo mendapat informasi yang sama dan menyeluruh terkait pelaksanaan pemilu 2024.

5. Pengembangan

Menurut Gibson dkk (2002) dalam Korengkeng et al., (2023) suatu organisasi perlu adanya untuk meningkatkan kapasitasnya dan terus berkembang untuk tetap bisa *survive* dalam jangka panjang. Dari hasil penelitian yang diperoleh, bahwasanya KPU Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan sosialisasi, perkembangan terlihat pada perubahan cara sosialisasi.

Mulanya kegiatan sosialisasi dilakukan dengan cara mengumpulkan massa dengan sebanyak-banyaknya bersamaan dengan tambahan hiburan rakyat untuk menarik minat masyarakat dalam kegiatan sosialisasi. Contohnya di tahun 2019 lalu, kegiatan sosialisasi pemilu dilakukan secara serentak dengan kegiatan konser musik dan pemilu *run* yang dihadiri lebih dari ratusan warga masyarakat dari berbagai kalangan. Selain itu juga, kegiatan sosialisasi untuk pemilu 2019 belum terlalu aktif menggunakan media sosial sebagai media penyebaran informasi dan masih menggunakan media cetak. Perkembangan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sidoarjo dimulai dari pengurangan massa sosialisasi, kini target massa sosialisasi adalah tidak lebih dari 100 orang untuk menghindari *overload* massa serta meningkatkan kenyamanan pada sesi sosialisasi agar sosialisasi dapat disampaikan dengan lebih tenang dan efektif.

Selain itu, KPU Kabupaten Sidoarjo menjadi lebih aktif dalam berjejaring sosial, dengan tetap mengunggah konten-konten seputar pemilu melalui akun *instagram* resmi KPU Kabupaten Sidoarjo di [@Kpu_sidoarjo](#). Hal ini dilakukan untuk dapat menarik perhatian pemilih pemula yang rata-rata berasal dari generasi Z dan milenial. Dan cara ini terbukti melalui peningkatan *followers instagram* yang mencapai lebih dari 100% serta kehadiran pemilih muda di Kabupaten Sidoarjo mencapai 64% dari total kehadiran. Ditambah lagi diadakannya maskot pemilu serta dinyanyikannya jingle pemilu sebelum kegiatan sosialisasi dimulai diharapkan dapat membuat masyarakat selalu ingat akan kegiatan pemilu 2024 yang akan datang.

KESIMPULAN

Sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Sidoarjo melalui berbagai metode seperti kirab pemilu, nonton bareng, dan sosialisasi umum di lembaga pendidikan serta komunitas dinilai efektif dalam menyebarkan informasi pemilu secara luas dan efisien, serta meningkatkan antusiasme masyarakat, yang terlihat dari peningkatan partisipasi pemilih sebesar 4,58% dari tahun 2019. KPU juga mampu beradaptasi dengan menggunakan media sosial seperti Instagram untuk menjangkau berbagai target, termasuk generasi muda. Pengembangan metode sosialisasi mengikuti perkembangan zaman menjadi kunci keberhasilan. Untuk lebih meningkatkan kualitas dan keberhasilan program sosialisasi, disarankan KPU terus mengembangkan metode kreatif dan inovatif, memanfaatkan lebih banyak platform media sosial, meningkatkan mekanisme umpan balik masyarakat, serta melakukan sosialisasi berkelanjutan di sekolah-sekolah dan komunitas, sekaligus memperbaiki performa dan update data di situs web KPU dengan format yang mudah dipahami seperti grafik atau diagram.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, R. C. (2022). MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK. 7(1).
- Fawaid, J., & Anugerah, B. (2023). Pemilu 2024 Sebagai Momentum Konsolidasi Demokrasi. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.33362.12484>
- Hardiyanti, M., Praditya Arcy Pratama, Aura Diva Saputra, Mila Mar'atus Sholehah, & M. Rizieq Aditya R. (2022). URGENSI SISTEM E-VOTING DAN SIREKAP DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU 2024. JOURNAL EQUITABLE, 7(2), 249–271. <https://doi.org/10.37859/jeq.v7i2.4257>
- Ismail Suardi Wekke, dkk. (n.d.). Metode Penelitian Sosial. Oktober 2019.
- KPU. (n.d.). Kirab Pemilu, Wahana Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Pemilu Kepada Masyarakat. Retrieved June 11, 2024, from <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11957/kirab-pemilu-wahana-sosialisasi-dan-penyebaran-informasi-pemilu-kepada-masyarakat>
- Maslekeh Pratama Putri. (n.d.). Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu sebagai upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur. 2016.
- Maulida, F., & Wijayanto, H. (2023). Efektivitas Strategi Bawaslu untuk Mencegah Suara Golput pada Pemilu 2024. JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 6(10), 7795–7799. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i10.2497>
- Paula, R., Salurante, B. D., & Primayanti, A. D. (2024). Efektivitas Fungsi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Parigi Moutong Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Masa Pandemi COVID-19. 6(1).
- Reynaldi Alex Korengkeng, Femmy Maria Gorettie Tulusan, & Novva Novita Plangiten. (n.d.). Efektivitas Organisasi Pemerintah Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa. 17 Mei 2023.
- Semiawan, P. D. C. R. (n.d.). Metode Penelitian Kualitatif. Grasindo.
- Sinaga, K. (n.d.). ANALISIS PARTISIPASI PUBLIK MENUJU DEMOKRASI BERKUALITAS PADA PEMILIHAN UMUM INDONESIA TAHUN 2024. 17.